

**PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN OLEH NOTARIS
DAN/ATAU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
DI KOTA PADANG**

TESIS

*Diajukan guna memenuhi persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan*



PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

2017

ABSTRAK

PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN OLEH NOTARIS

DAN/ATAU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

DI KOTA PADANG

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang utama bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Salah satu jenis pajak yang mempunyai peranan besar dalam penerimaan pemerintah adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Dalam Undang-Undang ini diatur bahwa Notaris dan/atau PPAT adalah salah satu wajib pajak orang pribadi atas setiap jasa yang diberikannya kepada masyarakat. Dengan adanya pembayaran pajak penghasilan terhadap Notaris dan/atau PPAT, maka perlu diketahui bagaimanakah pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan oleh Notaris dan/atau PPAT terkait jasanya, bagaimanakah peran Notaris dan/atau PPAT dalam pembayaran Pajak Penghasilan terkait jasanya serta Kendala apa saja yang ditemui pihak pajak terhadap pembayaran pajak penghasilan oleh Notaris dan/atau PPAT terkait jasanya. Untuk mengkaji dan menjawab permasalahan tersebut diatas maka penulisan tesis ini mempergunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kota Padang. Populasi dalam penelitian ini adalah Notaris dan/atau PPAT yang terdapat di kota Padang yang berjumlah 8 (delapan) orang dan 1 (satu) orang Pihak pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Notaris dan/atau PPAT dalam melakukan pembayaran pajak penghasilan menggunakan sistem *self assessment*, sehingga perhitungan PPh yang dipakai adalah Perhitungan Neto tersebut dengan dasar pencatatan. Hubungan antara sistem *self assessment* juga dikaitkan dengan teori daya pikul yang menyatakan bahwa pembayaran pajak didasarkan atas kemampuan seseorang. Peran Notaris dan/atau PPAT dalam pembayaran pajak merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam bidang perpajakan juga mempunyai peran yang sangat signifikan karena dari Notaris dan/atau PPAT berperan sebagai pemotong pajak dan penerima pajak penghasilan Pasal 21 , hanya saja peran Notaris dan/atau PPAT sebagai pemotong pajak penghasilan Pasal 21 belum dapat dilaksanakan karena perolehan penghasilan karyawan yang dipekerjakan Notaris dan/atau PPAT masih berada dibawah standar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu Rp 4.500.000/bulan. Dalam pelaksanaanya, pihak pajak sering terdapat kendala berupa idak patuhnya Notaris dan/atau PPAT dalam melakukan pembayaran pajak penghasilan, kurang terbukanya terhadap laporan catatan atau administrasi dari Notaris dan/atau PPAT, kurang sosialisasi dan kesabaran akan tahu lebih dalam tentang perpajakan termasuk jenis jenis pajak yang dilaporkan. Untuk itu dilakukan upaya pemeriksaan terhadap mereka yang tidak patuh dan menerapkan sanksi yang tepat. Melakukan pembinaan dan sosialisasi terkait aspek perpajakan serta adanya aturan hukum tersendiri mengenai perhitungan PPh Notaris dan/atau PPAT berkaitan dengan tarif honorarium atas jasa hukum yang diberikan Notaris dan/atau PPAT.

Kata Kunci :Pajak Penghasilan, *Self Assesment System*, Notaris dan/atau PPAT

ABSTRACT

THE PAYMENT OF TAX INCOME BY NOTARY

AND/OR LAND DEED OFFICIAL

IN PADANG CITY

Tax is one of state main resources to improve the welfare of people. One of them is Tax Income (PPh). It is regulated in Indonesian Regulation No. 36 the year of 2008. It is stated that Notary and/or PPAT is one of tax individual sources from every service given to the society. By paying tax income toward the Notary and/or PPAT, it is critically needed to know how the implementation of paying the tax income by Notary and/ PPAT related to his/her service, how the role of Notary and/or PPAT in paying the tax income related to his/her services and what problems they found in paying the tax income related his/ her services. The Descriptive Analytic – Research with judiccal empirical Approach was used to analyze and answer the above problems in this study. The research was conducted in Padang City. The population was all of Notaries and/or PPAT in Padang city consisted of 8 (eight) Notaries and/or PPAT and a tax officer from Tax Office (Kantor Pelayanan Pajak Pratama). The research result showed that Notary and/or PPAT paid the tax income using, and the calculation of tax income used was based on Neto record. The correlation between self- assessment system was also corelated to the “daya pikul” theory, stated that the tax payment was based on the Notary’s and/or PPAT abilities. The role of Notary and/or PPAT in tax payment was the government representative in the taxation. It has the significant roles because Notary and/or PPAT acts as the tax withholder and the receiver of tax income article 21. Meanwhile, his/her roles could not be implemented because they have below low standard non taxable income namely Rp 4.500.000/month. In fact, the tax office found many problems such as the disobedient Notary and/or PPAT in tax payment and lack of socialization about the reported taxes. Based on this result, it is very important to check the disobedient Notary and/or PPAT to apply the suitable sanctions. Moreover, the socialization and trainings related to tax aspects and the self- laws related to the calculation of Notary’s and/or PPAT tax incomes and extra salaries tariff and Notary and/or PPAT law given services.

Keyword : Tax Income, Self Assessment System, Notary and/ PPAT